

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring dengan implementasi desentralisasi fiskal dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah daerah dituntut untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun, dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesalahan pencatatan anggaran, kurangnya koordinasi antar bidang, serta hambatan teknis dalam penerapan SIPD.

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi. Masih banyak daerah yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Wajar (TW) karena lemahnya sistem pencatatan serta tata kelola aset tetap yang belum tertib (BPK RI, 2023). Hal ini berdampak pada kredibilitas pemerintah daerah dan memengaruhi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Insentif Daerah (DID).

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, pemerintah telah meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIPD merupakan sebuah platform digital terpadu yang dirancang untuk meminimalkan kesalahan

pencatatan, mempercepat pelaporan, dan menyederhanakan rekonsiliasi data (Kemendagri, 2020). Namun, penerapan SIPD di berbagai daerah menghadapi tantangan, termasuk pelatihan pegawai yang tidak memadai, ketidakkonsistenan format data, dan gangguan teknis (Nasution & Nurwani, 2021).

Penyusunan laporan keuangan berbasis realisasi anggaran menjadi bagian dari tanggung jawab penting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah. Tahapan ini mencakup pengumpulan data keuangan dari berbagai sektor, pencatatan secara sistematis dalam jurnal akuntansi, proses validasi internal, serta penyampaian laporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Seluruh proses penyusunan laporan keuangan ini harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 mengenai penyusunan APBD.

Meskipun telah ditetapkan prosedur standar, berbagai tantangan tetap muncul. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data antar bidang yang mengakibatkan perlunya revisi berulang (BPK RI, 2023). Selain itu, gangguan teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sering mendorong pegawai untuk melakukan pencatatan secara manual (Kemendagri, 2020). Rendahnya pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi berbasis akrual juga menjadi faktor penyulit. Kurangnya pelatihan menjadikan pencatatan aset tetap, utang, dan belanja modal sering kali mengalami kesalahan (Ginanjari, 2021).

Ketidakakuratan dalam laporan keuangan daerah memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar masalah administratif, yaitu menghambat proses pembangunan. Penyaluran dana bisa tertunda akibat laporan yang tidak akurat atau terlambat. Situasi ini berpotensi memengaruhi peringkat keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pelaporan keuangan di instansi pemerintah. Ramayanto dan Yunarni (2022) melakukan penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BAPPEDA Lombok Barat, Tetapi mereka belum membahas aspek teknis dalam penyusunan laporan yang berbasis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, Wijaya dan Meutia (2021) meneliti prosedur penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan di Bappeda Kota Depok. Namun, studi tersebut tidak memberikan penekanan khusus terhadap aspek integrasi sistem informasi yang mendukung proses pelaporan. Jayanti dan Supriatna (2024) mengkaji audit terhadap tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bappeda Provinsi Jawa Barat Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap kerangka sistem pelaporan, meskipun belum menguraikan secara rinci mengenai alur kerja teknis di tingkat pelaksana. Terakhir, Al Aziz dan Rahmazaniati (2022) membahas pengaruh sistem akuntansi terhadap kualitas laporan, walaupun kurang fokus pada prosedur operasional yang perlu diimplementasikan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki peranan penting dalam mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan kajian mendalam tentang prosedur penyusunan laporan keuangan di Bappeda Kabupaten Pemalang, khususnya dalam konteks penerapan SIPD dan akuntansi berbasis akrual. Diharapkan, penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi, peran masing-masing pihak yang terlibat, serta solusi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini hanya membahas proses internal di Bappeda hingga tahap penyampaian laporan ke Unit Akuntansi Keuangan Daerah (UAKD) , dan tidak mencakup audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis memilih judul “**Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang**” sebagai sebagai topik yang akan dikaji dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, ruang lingkup dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan pada Bappeda Kabupaten Pemalang?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan di Bappeda Kabupaten Pemalang?

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dengan mempertimbangkan ruang lingkup kajian yang telah diuraikan, studi ini bertujuan mengungkap :

1. Menjelaskan proses atau prosedur penyusunan laporan keuangan di Bappeda Kabupaten Pematang Jaya.
2. Mengidentifikasi masalah atau kendala yang sering terjadi dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan dan apa saja tugas mereka.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1.4.1. Bagi penulis**

Melalui kajian ini, penulis bertujuan untuk memahami secara menyeluruh tahapan dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Daerah, sehingga memiliki kesiapan baik dari segi teori maupun praktik untuk digunakan di dunia kerja.

#### **1.4.2. Bagi Universitas Diponegoro**

Hasil studi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir berikutnya.

#### **1.4.3. Bagi Instansi**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi instansi terkait, khususnya dalam memberikan masukan atau gambaran mengenai pelaksanaan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Selain itu, kajian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyusunan laporan keuangan di masa mendatang.

### **1.5 Cara Pengumpulan data**

Dalam melaksanakan suatu penelitian, data merupakan unsur utama yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang relevan guna menunjang penyusunan Laporan Tugas Akhir. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Data Penelitian**

Penulis menggunakan dua jenis data utama dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini untuk memperoleh informasi yang akurat serta menunjang kelancaran proses penulisan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang dituju dan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi faktual. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari Bidang Keuangan Bappeda Kabupaten Pemalang melalui kegiatan wawancara, tanya jawab, observasi, dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui atau mengacu pada informasi yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, peraturan, atau catatan dari instansi terkait. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, data sekunder yang digunakan antara lain dokumen mengenai peraturan penyusunan laporan keuangan daerah, dasar hukum penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta buku-buku yang mendukung topik penelitian mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan di Bappeda Kabupaten Pemalang.

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disusun secara sistematis guna memperoleh informasi yang relevan dan mendukung keabsahan data. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka antara pewawancara dan informan, dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan (2002), wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana pewawancara menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden, sementara jawaban yang diberikan dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan Subbagian Keuangan Bappeda Kabupaten Pematang Jaya untuk mendapatkan informasi terkait tahapan penyusunan laporan keuangan serta hambatan yang muncul dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

#### b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas yang berlangsung di lokasi penelitian tanpa menggunakan alat ukur khusus. Menurut Sarwono (2007), observasi adalah metode pengumpulan data yang mengandalkan penglihatan atau indera mata tanpa bantuan instrumen standar. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung terhadap proses penyusunan laporan keuangan di Bidang Keuangan Bappeda Kabupaten Pematang Jaya, yang



mencakup interaksi antarpegawai serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah literatur, buku, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Nazir (2013), studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang menjadi dasar teori dan pembandingan antara kondisi ideal dan praktik di lapangan. Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan terhadap referensi yang membahas prosedur penyusunan laporan keuangan daerah, akuntansi berbasis akrual, serta penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di instansi pemerintah, khususnya pada Bappeda Kabupaten Pematang Jaya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Kajian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sistematika penulisan disusun sebagai panduan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir agar isi laporan tersusun secara terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat empat bagian pokok dalam laporan ini, yang secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat beberapa komponen penting sebagai dasar penyusunan laporan, yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum isi laporan secara menyeluruh.

## **BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Dalam bab ini, disajikan gambaran umum terkait Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang, meliputi sejarah singkat pendirian, letak instansi, visi dan misi, struktur organisasi, serta uraian tugas dari masing-masing bidang yang ada. Selain itu, bab ini turut memaparkan informasi lain yang berkaitan dengan peran serta fungsi Bappeda dalam mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian, yakni terkait prosedur penyusunan laporan keuangan di Bappeda Kabupaten Pemalang. Pembahasan dalam bab ini mencakup definisi laporan keuangan, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tahapan-tahapan dalam proses penyusunan laporan, pihak-pihak yang terlibat, serta berbagai kendala yang dihadapi. Selain itu, dijelaskan pula solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan selama proses pelaporan berlangsung

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan temuan selama proses penyusunan Tugas Akhir berlangsung.